

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BENGKULU (STUDI PASAR PANORAMA SINGARAN PATI)

Apriani Suita Putri ¹⁾; Azuwandri ²⁾ ; Ridianto³

Program of Public Administration

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾ aprianisuitaputri@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 November
2025]

Revised [25 Desember 2025]

Accepted [31 Januari 2026]

KEYWORDS

Kebijakan, Pmerintah,
Pasar Panoarama

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Hasil studi ini menampilkan jika implementasi kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Panorama telah berjalan cukup baik. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi kepada pedagang, meskipun masih terdapat kendala pada kejelasan pesan. Sumber daya dan prasarana masih terbatas, namun pelaksanaannya cukup efektif. Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan aturan, meskipun pengawasan belum maksimal. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai prosedur, namun masih perlu peningkatan dalam koordinasi dan ketegasan pelaksanaan. Faktor pendukung implementasi meliputi kerja sama antara aparat pasar dan pedagang serta dukungan pemerintah daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran sebagian pedagang terhadap aturan yang berlaku

ABSTRACT

The findings indicate that the policy implementation has been carried out fairly well. Communication was conducted through socialization to vendors, though message clarity remained an issue. Human and material resources were limited but functioned effectively. The implementers disposition showed strong commitment to policy enforcement, despite less optimal supervision. The bureaucratic structure worked according to procedures but required improvements in coordination and consistency. Supporting factors included cooperation between market authorities and vendors, as well as local government support. Meanwhile, inhibiting factors were limited resources and a lack of awareness among some vendors regarding the regulations

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima (PKL), atau biasa dikenal pedagang dari kalangan ekonomi lemah, termasuk suatu fenomena atau mata pencaharian umum yang ada di Indonesia. Munculnya fenomena ini diakibatkan peningkatan jumlah pengangguran serta pertumbuhan penduduk disuatu daerah, maka setiap masyarakat mencari alternatif pekerjaan diluar bidang yang formal (M. A. Rahman, 2018). Disebagian kota besar, PKL sering dianggap berpeluang besar dalam bertahan hidup. Tidak terkontrol dan tingginya arus urbanisasi telah berkontribusi pada perkembangan PKL. Jumlahnya tidak berkurang meskipun sudah ditertibkan, namun justru membuatnya semakin bertambah (Setiawan, 2020).

Menurut Riyadi (2010) mengemukakan bahwa PKL dapat berfungsi sebagai sarana interaksi sosial di masyarakat. Mereka menciptakan ruang publik yang hidup dan berkontribusi pada kehidupan sosial di lingkungan sekitar. Namun, keberadaan PKL juga dapat menimbulkan konflik dengan pengguna jalan dan pedagang formal jika tidak dikelola dengan baik. Pedagang Kaki Lima yaitu aktivitas yang dilakukan oleh

individu atau kelompok yang berusaha menawarkan dagangannya di trotoar, badan jalan dan teras toko. PKL sering kali dianggap sebagai penjual liar atau penjual eceran, di mana izin dari pemerintah masih belum jelas atau bahkan tidak ada. Pertumbuhan PKL sering kali menimbulkan masalah di suatu daerah. PKL yang menggunakan ruang publik menyebabkan lokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pengguna sesuai fungsinya. Keterbatasan tempat memaksa PKL untuk berjualan di lokasi yang tidak semestinya, seperti trotoar, untuk menawarkan dagangan mereka. Pengelolaan PKL, termasuk kebijakan, serta memberi wawasan yang mendalam tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan PKL (Rezky Zalsha Rusdi, 2025).

Dalam perkembangan yang cepat, diharapkan pemerintah dapat menyediakan lokasi strategis bagi para pedagang untuk berjualan, tanpa penyuluhan dan memberikan informasi agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menerapkan kebijakan pengelolaan yang telah diterapkan di Pasar Panorama. Melalui penyuluhan yang diterima, diharapkan para PKL dapat mengelola usaha mereka dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, rapi, dan menarik. PKL merupakan badan usaha yang beroperasi di trotoar di jalan umum, dan permasalahan yang dihadapi oleh mereka merupakan tantangan yang kompleks dalam penataan kota. Penanganan yang dilakukan secara cepat melalui penertiban dan pengusuran sering kali memicu protes dari beragam pihak. Dari anggapan jika PKL sebagai sumber permasalahan dalam menata lingkup perkotaan, pemerintah melaksanakan penertiban dari pengusuran, pengusiran hingga pembersihan.

Aktivitas para pedagang ini tentu saja dapat mengganggu fungsi fasilitas umum yang ada di suatu wilayah. Dari sudut pandang positif, sektor informal PKL berfungsi sebagai penampung bagi pekerja yang tidak dapat terserap di sektor formal, maka angka pengangguran akan berkurang. Hadirnya PKL di wilayah perkotaan bisa memicu vitalitas kawasan yang mereka huni serta berfungsi menjadi penghubung antar berbagai fungsi pelayanan kota (Rizky, 2019). PKL dianggap sebagai bentuk usaha mikro yang memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan, terutama dalam menyerap pekerja serta memenuhi keperluan masyarakat kelas menengah kebawah. Namun, kehadiran PKL seringkali menimbulkan berbagai masalah perkotaan, seperti kemacetan, ketidakteraturan tata ruang, serta konflik dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha formal. Di Pasar Panorama, misalnya, meskipun PKL berperan penting dalam perekonomian lokal, keberadaannya kerap dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan PKL adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah dihadapkan pada tugas untuk menyediakan ruang usaha yang layak bagi PKL tanpa mengurangi pendapatan mereka, sekaligus menjaga ketertiban dan keindahan kawasan publik. Upaya penertiban yang dilakukan secara represif tanpa diiringi solusi alternatif seringkali menimbulkan resistensi dari para pedagang. Sebaliknya, pendekatan yang lebih kolaboratif, seperti penyediaan lokasi strategis, pembinaan, serta sosialisasi peraturan, dinilai lebih efektif dalam menciptakan tata kelola PKL yang berkelanjutan.

Di Pasar Panorama sendiri keberadaan pedagang kaki lima semakin hari semakin meningkat hal ini dapat kita lihat dari banyaknya PKL yang ada dalam Pasar Panorama dan yang lebih mengejutkan lagi dominan dari PKL tidak memegang perizinan usaha dari pemerintah, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan penataan serta penertiban PKL ini.

Masalah-masalah yang ada berkaitan dengan pengaturan PKL. Sebenarnya, kebijakan pengelolaan PKL tercantum dalam Perda No 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan pasar. Dalam Bab II Pasal 2, dijelaskan tentang Target Pengelolaan Pasar Rakyat. Mewujudkan Pasar Rakyat yang sehat, aman, teratur serta tertib. Dengan perencanaan nonfisik dan fisik, 1. Dari segi fisik mencakup : a. penetapan lokasi b. penyajian prasarana tata letak serta bangunan 2. Dari segi non fisik dilaksanakan untuk menjalankan aktivitas kelola Pasar Rakyat dengan didasarkan kebijakan yang sudah ditentukan.

Hingga saat ini kebijakan tersebut belum berhasil dimaksimalkan, hal ini diakibatkan dari prasarana pendukung, SDM, infrastruktur serta manajemen yang kurang baik dan juga dikarnakan eksternal seperti faktor budaya sosial, ekonomi serta budaya. Berbagai kebijakan yang pemerintah buat tetapi belum bisa diterapkan dengan optimal. Pemerintah kota perlu bisa berperan aktif dalam mengelola, mengarahkan serta membina PKL.

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi bisa dikaitkan dengan sebuah aturan yang merujuk pada kepentingan khalayak umum. Kegunaan dari sebuah kebijakan bisa dirasakan sesudah di implementasikan. Implementasi berupa suatu proses perencanaan suatu kebijakan. Terdapat definisi implementasi.

Wibowo (2025) menguraikan jika implementasi adalah penerapan kebijakan dalam praktik yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan

keberhasilan. Mengemukakan jika implementasi berupa suatu proses dimana kebijakan yang sudah dirumuskan diterapkan dalam praktik, dan keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sumber daya dan komitmen dari semua pihak terkait (Rizal, 2021).

Sementara itu, Londa dan Dengo (2017:79) dari segi etimologi, implementasi bersumber dari bahasa Inggris "to implement", dimaknai sebagai penerapan atau penyelenggaraan. Pressman and Wildavsky dalam Hill and Hupe Dengo dan Londa (2017:79) meringkas jika "to implement" atau menyelenggarakan serta "to provide the means of carrying out" atau menyajikan fasilitas dalam melaksanakan sesuatu; "to give practical effect to" memicu efek pada suatu hal, atau to fulfill, to accomplish, to complete, to produce, Pressman and Wildavsky dalam Londa dan Dengo (2017:79) menguraikan jika implementasi memiliki sebuah obyek (object) seperti kebijakan (policy). Muhammad Joko Susilo (2018), Implementasi dianggap sebagai menjalankan suatu hal terkait dengan kebijakan yang bisa memicu beragam dampak. Implementasi berupa penerapan inovasi, kebijakan, ide atau konsep dengan tujuan menggapai hasil yang diharapkan.

Berikutnya dari pandangan Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2001: 65) "Implementasi dianggap sebagai tindakan yang dilaksanakan setiap orang dengan bertujuan menggapai target yang sudah ditentukan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dianggap sebagai proses penting dalam siklus kebijakan publik yang menghubungkan antar perumusan kebijakan dengan hasil nyata di lapangan. Nugroho dan Santoso (2019), implementasi kebijakan berupa proses penerapan kebijakan supaya bisa mencapai target dengan optimal. Jika dikaitkan dengan pengelolaan PKL, implementasi kebijakan bermaksud mengelola keberadaan PKL supaya tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sari dan Wibowo (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan PKL sangat didampaki dari faktor fasilitas, kontribusi masyarakat serta SDM. Pemerintah perlu mampu menyediakan fasilitas yang memadai dan melakukan pengawasan secara konsisten agar PKL dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, menurut Prasetyo et al. (2021), koordinasi antar lembaga pemerintah dan komunikasi yang efektif dengan para pedagang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKL. Pendekatan partisipatif yang melibatkan PKL dalam proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Setelah itu, Menurut Anderson (2018), menyatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menghubungkan teori dengan praktik. Ia menekankan bahwa implementasi yang berhasil harus mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses keseluruhan dalam penentuan kebijakan baru bisa dimulai sesudah target yang awalnya bersifat umum sudah dijabarkan secara rinci, rencana yang sudah disusun serta sebagian dana sudah disediakan untuk menggapai targetnya tersebut.

Implementasi kebijakan merujuk pada proses di mana, setelah suatu isu publik dimasukkan ke dalam agenda politik. Lalu, pemerintah akan menyelenggarakan sejumlah putusan politik. Ada sebagian pendekatan dalam implementasi, misalnya *Top-Down*, yang menekankan bagaimana strategi bisa diterjemahkan dengan efisien menjadi target para pembentuk kebijakan. Lalu ada pendekatan *Bottom-Up*, yang melihat implementasi kebijakan dari pandangan target politik.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan PKL didampaki dari sebagian faktor seperti:

1. SDM yang berintegritas serta kompeten.
2. Fasilitas yang memadai, seperti tempat berjualan yang layak.
3. Kontribusi aktif masyarakat dan PKL dalam mendukung kebijakan.
4. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan instansi terkait.
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
6. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan yang efektif.

Masalah terkait implementasi kebijakan menjadi fokus perhatian para ahli karena seringkali kebijakan yang dirancang tidak menunjukkan efektivitas saat diterapkan. M Abdullahi (2020) mengemukakan istilah *Bridging the Gap between Policy Intent and Implementation* yang menjelaskan kurangnya hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana, yang menyebabkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dianggap sebagai kumpulan tindakan untuk mengelola atau mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Anderson (2018),

kebijakan publik merupakan program tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini bersifat normatif dan mengikat, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan PKL, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur keberadaan, aktivitas, dan dampak PKL terhadap lingkungan sosial dan ekonomi.

Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah. Teori rasional menekankan pemilihan kebijakan paling efisien dan memberikan manfaat terbesar, tetapi sulit diterapkan dalam praktik politik yang sarat kepentingan. Teori inkremental, sebagaimana dijelaskan Lindblom (1959), melihat kebijakan sebagai perubahan kecil bertahap sehingga lebih realistis, tetapi cenderung lambat berinovasi. Teori elit menyoroti dominasi kelompok elit dalam penentuan kebijakan, sedangkan teori kelompok menganggap kebijakan lahir dari interaksi dan kompetisi antar kelompok kepentingan dengan pemerintah sebagai mediator. Selain itu, teori sistem oleh Easton (1965) memandang kebijakan sebagai hasil olahan input masyarakat (tuntutan dan dukungan) yang di ubah menjadi output kebijakan dalam lingkungan sosial dan politik tertentu.

Proses kebijakan pemerintah umumnya melalui beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan evaluasi (Dunn, 2020). Pemahaman terhadap teori kebijakan ini penting untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah, memastikan kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan publik, serta menambahkan dasar ilmiah dalam penelitian kebijakan publik.

Model Implementasi Kebijakan

Model ini dikenalkan oleh Merilee S. Grindle (1997) menjabarkan jika ukuran keberhasilan implementasi dapat dievaluasi melalui dua pendekatan utama:

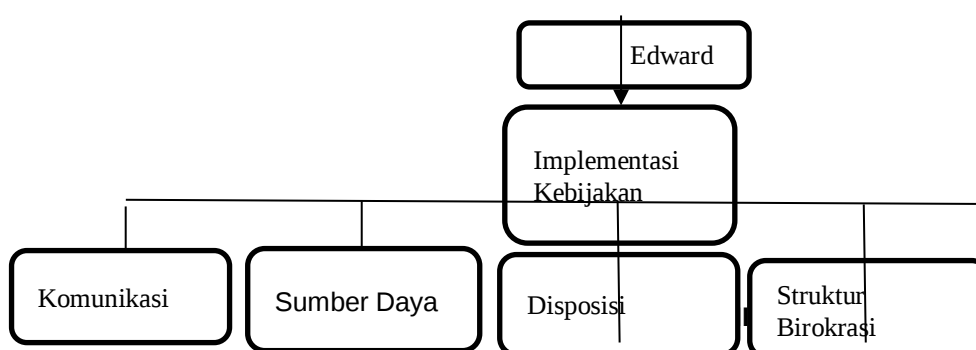
1. Pendekatan Proses

Pendekatan ini menilai apakah penyelenggaraan rencana sudah relevan dengan definisi yang sudah diterapkan. Ini melibatkan analisis program aksi yang ada, termasuk tahapan yang dipilih, prosedur yang diikuti serta sumber daya yang diandalkan. Dengan kata lain, evaluasi ini fokus pada bagaimana kebijakan diimplementasikan dan apakah semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2. Pendekatan Hasil

Pendekatan ini mengevaluasi apakah tujuan dari program tersebut telah tercapai. Ini melibatkan pengukuran hasil akhir dari kebijakan, seperti dampak yang dirasakan oleh masyarakat, perubahan yang terjadi, dan pencapaian indikator-indikator yang diterapkan. Evaluasi ini lebih berfokus pada efek dan hasil dari kebijakan bukan hanya pada proses pelaksanaannya.

Sesuai dengan pandangan George C. Edward III (Agustino, 2019: 136-137) yang berasumsi jika ada sebagian variabel yang bisa menetapkan kesuksesan implementasi: seperti sumber daya (*resources*), komunikasi (*communication*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) serta sikap atau disposisi (*dispositions or attitudes*). Keempatnya akan berfungsi dengan bersamaan dan saling berkaitan dalam menggapai target. Edward III mengilustrasikan terkait sebagian variabel tersebut yaitu seperti gambar berikut ini.



a. Komunikasi

Subarsono (2019), menguraikan jika komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan (*Public Policy*), di definisikan sebagai proses pemberian pesan antar pembuat kebijakan serta masyarakat. Komunikasi bisa dijadikan jembatan yang menghubungkan pembuat kebijakan dengan masyarakat, membantu dalam penyampaian kebijakan.

Gerorge C Edward III (1980) mengemukakan jika komunikasi termasuk sebuah variabel kunci untuk mengimplementasikan kebijakan. Menurutnya, komunikasi yang efektif bisa mencapai target dari pelaksana kebijakan mencakup aspek tranmisi, konsistensi dan kejelasan informasi.

1. Tranmisi

Transmisi kebijakan proses penting yang melibatkan penyampaian informasi dan instruksi dari pembuat pada pelaksana kebijakan. Transmisi yang efektif sangat krusial untuk menjamin jika kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa transmisi kebijakan meliputi proses komunikasi, kejelasan dan konsistensi, dukungan pemangku kepentingan, pentingnya umpan balik (O'Toole,2020).

Transmisi merupakan faktor utama dalam komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi berfokus pada perubahan kebijakan publik menjadi tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara. Pengimplementasian kebijakan yang efektif bisa didukung oleh komunikasi yang baik, namun tidak jarang ditemukan kesalahpahaman (miscommunication) yang diakibatkan berbagai lapisan birokrasi yang perlu dilalui. Sebelum pemerintah mengambil sebuah putusan, mereka perlu menyadari jika putusan yang sudah diambilnya perlu diselenggarakan.

2. Kejelasan

Winarno (2020), kejelasan dalam komunikasi adalah aspek penting yang menjamin jika informasi yang diberikan bisa dimengerti oleh penerima. Kejelasan mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, struktur yang logis, dan penghindaran ambiguitas. Dalam konteks ini, Winarno menekankan bahwa komunikasi yang jelas dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas interaksi antara pengirim dan penerima pesan. Kejelasan juga berperan dalam membangun hubungan yang baik dan saling pengertian dalam proses komunikasi.

b. Sumber Daya

Edward III (Agustino, 2019: 138) untuk mengimplementasikan kebijakan, sebagian indikator sumber daya yaitu:

a. Staf

Pelatihan dan pengembangan staf juga berperan penting, karena program pelatihan yang tepat membantu staf memperoleh keterampilan yang diperlukan, meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Edward III (Agustino, 2019: 138) Kualitas staf, yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

b. Wewenang

Menurut Edward III (Agustino, 2019:138), Kewenangan harus dilakukan individu atau tim yang tepat, disertai dengan tanggung jawab yang jelas untuk menghindari kebingungan. Desentralisasi kewenangan dapat meningkatkan responsivitas, sementara pengawasan dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan kebijakan. Secara keseluruhan, pengelolaan kewenangan yang baik merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Informasi

Informasi mencakup data dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Edward, 2019:138). Informasi yang akurat sangat penting, agar membantu memahami konteks yang di hadapi. Kualitas informasi harus diperhatikan, karena informasi yang tidak akurat mengarah pada keputusan yang salah. Informasi yang berkualitas merupakan elemen kunci yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Edward III (dikutip dalam Agustino, 2019: 138), Fasilitas mencakup semua alat yang diperlukan dalam mendukung suatu kebijakan. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk menjamin setiap penyelenggara bisa melaksanakan tugas dengan akurat. Lalu, pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas juga harus diperhatikan. investasi dalam fasilitas yang tepat dan pengelolaan yang baik merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi termasuk aspek yang berkontribusi signifikan pada efektivitas implementasi kebijakan. Jika para pelaksana memiliki sikap atau kecenderungan positif serta mendukung pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakannya berpotensi diimplementasikan selaras dengan putusan awal. Namun apabila setiap penyelenggara bersikap menolak, sehingga penyelenggaraanya akan bertentangan. Disposisi bisa mempengaruhi interaksi sosial dan kolaborasi dalam kelompok. Disposisi positif, seperti keterbukaan dan empati, dapat meningkatkan dinamika kelompok dan hasil kerja sama (M. A. H. van der Linden, 2020).

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi dianggap sebagai instansi yang berperan sebagai penyelenggara beragam aktivitas. Dengan adanya birokrasi akan dapat melaksanakan suatu kebijakan. Rumitnya dalam mengimplementasikan kebijakan membutuhkan kolaborasi dengan beragam pihak. Sehingga struktur

birokrasi perlu berperan mendukung. Sehingga penting untuk memahami struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sebagian karakteristik dari birokrasi, yaitu fragmentasi serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP). SOP berupa sekumpulan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi. Dalam konteks birokrasi, SOP berperan untuk memastikan bahwa setiap proses dilaksanakan dengan konsisten. Dengan adanya SOP, setiap pegawai atau anggota organisasi mengetahui tahapan yang mesti diambil, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, SOP juga berfungsi untuk menjaga akuntabilitas, karena setiap tindakan dapat dilacak dan dievaluasi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Edwards III, dari seluruh aspek tersebut, akan bisa memberi kontribusi pada implementasi kebijakan, baik untuk menghambat atau mendukung proses implementasi. Sehingga, pendekatan paling tepat untuk menangani kompleksitas ini yaitu dengan mengkaji seluruh aspek yang terlibat.

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan (management) merupakan proses mengatur sumber daya untuk menggapai suatu target dengan optimal. George R. Terry (2019), Pengelolaan berupa proses organizing (pengorganisasian), planing (perencanaan), controlling (pengawasan) serta actuating (penggerakan) yang dilaksanakan untuk menggapai suatu target dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.

Pengelolaan PKL adalah upaya pemerintah untuk mengatur keberadaan dan aktivitas PKL agar dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurut Sari (2019), pengelolaan PKL meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Penataan lokasi berjualan agar tidak mengganggu ketertiban umum.
2. Pemberian izin usaha untuk memberikan legalitas kepada PKL.
3. Pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha PKL.
4. Penegakan peraturan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran.

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik. Menurut Putri dan Hidayat (2019), kepuasan masyarakat dapat diukur dari persepsi mereka terhadap efektivitas, keadilan, dan dampak kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks pengelolaan PKL, tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kesejahteraan.

Rahmawati dan Santoso (2022) menemukan bahwa masyarakat di sekitar pasar tradisional cenderung merasa puas jika kebijakan pengelolaan PKL mampu mengurangi kemacetan, menjaga kebersihan, dan meningkatkan keamanan lingkungan. Namun, kepuasan juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat dan pedagang dalam proses pengelolaan.

Menurut Lestari et al. (2020), evaluasi kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan metode survei dan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan PKL. Hasil evaluasi ini bisa dijadikan bahan evaluasi kebijakan supaya lebih peka dengan kepentingan masyarakat.

Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima memiliki beberapa versi asal-usul. Menurut catatan sejarah, istilah ini sudah dikenal sejak masa kolonial Belanda ketika trotoar di kota-kota besar memiliki lebar sekitar lima kaki atau $\pm 1,5$ meter. Jalur inilah yang kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk berdagang sehingga dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima (Historia.id, 2019).

Versi lain menyebutkan bahwa istilah ini menggambarkan sarana usaha PKL, yakni gerobak beroda tiga dan dua kaki pedagang yang jumlahnya lima, sehingga secara simbolik dikenal sebagai “kaki lima” (Suarakalbar.co.id, 2023). Terlepas dari asal usul istilahnya, PKL kini diakui sebagai bagian dari dinamika ekonomi perkotaan Indonesia.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai pengusaha kecil yang melaksanakan perdagangan di ruang publik dengan modal kecil dan skala usaha terbatas. Soekanto (2019), PKL tergolong bagian informal yang berfungsi penting dalam perekonomian lokal karena menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta menyerap tenaga kerja. Namun, keberadaan PKL juga menimbulkan beragam persoalan, misalnya ketidakteraturan tata ruang, kemacetan lalu lintas, serta gangguan kebersihan serta estetika kota.

Dalam Perpres No 125 Tahun 2012 terkait Pemberdayaan & Koordinasi Penataan Koordinasi Penataan PKL pasal 1 ayat (1), PKL dianggap sebagai pengusaha yang berdagang dengan mengandalkan prasarana usaha bergerak ataupun tidak bergerak, mengandalkan fasilitas sosial, umum atau kota yang sifatnya tidak permanen.

Keberadaan PKL di kota-kota Indonesia sering kali menghadapi tantangan terkait masalah keamanan serta gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Citra kumuh, liar, dan merusak estetika seolah

telah menjadi stigma yang melekat dalam bisnis mikro ini. Penertiban yang sering dilakukan oleh Satpol PP sering kali berujung pada perlawanan fisik dari para PKL. Tak jarang, dengan dukungan dari masyarakat, mereka melakukan aksi unjuk rasa. Apabila PKL dikelola dan diatur secara baik, hal ini dapat meningkatkan keindahan kota dan lebih tampak tertata dan rapi. Pembinaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan. Dalam konteks Pedagang Kaki Lima (PKL), pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan usaha, memahami peraturan yang ada, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Pembinaan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti manajemen usaha, pemasaran, sanitasi, dan pelayanan kepada pelanggan. Dengan pembinaan yang efektif, diharapkan PKL dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL) serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci dan sistematis mengenai kebijakan pemerintah, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

Setelah melakukan wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis serta pembahasan mengenai hasil uji, dan wawancara yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2020:131), analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun data dalam pola tertentu, serta memilih informasi yang penting untuk dipelajari. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang telah didapatkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik Analisa kualitatif. Adapun tahapan teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dipilah berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Informasi yang mendukung tujuan penelitian dipertahankan, sedangkan data yang tidak relevan atau berulang dieliminasi. Proses ini membantu peneliti memusatkan perhatian pada temuan inti, seperti implementasi kebijakan, hambatan, faktor pendukung, dan dampaknya terhadap pedagang kaki lima maupun masyarakat. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

1. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan agar mudah dipahami. Penyajian ini memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antarkomponen data, pola pelaksanaan kebijakan, serta respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan PKL.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data tersaji, peneliti menarik kesimpulan awal mengenai efektivitas implementasi kebijakan pemerintah. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber data (pemerintah, PKL, masyarakat) dan konfirmasi langsung kepada informan (member check), sehingga hasil analisis memiliki validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi.

Melalui metode analisis ini, diharapkan dapat terungkap secara komprehensif bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan, faktor-faktor yang menentukan keberhasilannya, serta persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil penataan pedagang kaki lima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penerapan teori George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan menunjukkan bahwa terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Hal ini selaras dengan fokus permasalahan yang dijadikan acuan utama oleh peneliti dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang terkait pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian ini di lapangan menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Panorama, Kota Bengkulu belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan, para pelaksana kebijakan perlu dipersiapkan serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan wajib menyampaikan informasi jelas kepada pelaksana, sehingga mereka dapat memahami isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran kebijakan tersebut. Dalam proses komunikasi kebijakan, terdapat tiga faktor penting yaitu, transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Dari hasil penelitian, diketahui pada bagian transmisi dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Perda Kota Bengkulu No. 1 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif kepada para pelaksana maupun sasaran kebijakan. Informasi mengenai isi, tujuan, serta aturan perda tersebut masih belum diterima secara merata, terutama di kalangan pedagang kaki lima. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang tidak mengetahui ketentuan berjualan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menandakan bahwa proses penyampaian kebijakan pemerintah daerah ke lapangan belum berjalan optimal.

Kendala yang dihadapi dalam komunikasi antara pihak pemerintah dan pedagang kaki lima (PKL) bukan disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah, melainkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pedagang terhadap kebijakan yang telah disampaikan. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan pedagang. Namun demikian, masih terdapat pedagang yang memilih untuk tetap berjualan di lokasi yang dilarang dengan alasan bahwa tempat tersebut lebih ramai pembeli.

Selanjutnya pada faktor kejelasan kebijakan diimplementasikan, meskipun perda telah memuat aturan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL, namun bahasa dan detail aturan yang tertuang belum sepenuhnya dipahami oleh para pedagang. Banyak pedagang menilai bahwa informasi yang diberikan masih belum bersifat umum dan kurang rinci dalam menjelaskan teknik pelaksanaan, seperti prosedur pemindahan lokasi maupun ketentuan retribusi. Kurangnya sosialisasi yang terstruktur juga membuat pemahaman pedagang berbeda-beda, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan di lapangan. Menunjukkan bahwa kendala utama dalam komunikasi antara pemerintah dan PKL terletak pada aspek kejelasan pesan kebijakan. Walaupun informasi sudah disampaikan melalui sosialisasi dan surat resmi, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan pedagang. Hal ini mengindikasikan bahwa pesan kebijakan belum sepenuhnya diterima secara jelas, sehingga perlu adanya penyampaian dengan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik seluruh pedagang.

Sementara itu, pada faktor konsistensi, pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan aturan perda tersebut. Hal ini tercermin dari adanya toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang, seperti masih beroperasinya PKL di area terlarang tanpa penindakan tegas. Ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan ini menimbulkan persepsi bahwa perda tidak dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga tujuan penataan dan pemberdayaan PKL sulit tercapai secara optimal.

Sumber Daya

Sumber daya unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang pemerintah tidak akan berjalan secara optimal. UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan menata kegiatan perdagangan di kawasan Pasar Panorama. Pemanfaatan aset menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam mengimplementasikan kebijakan penataan dan pengelolaan PKL yaitu ketersediaan staf, Fasilitas, bangunan dan lahan. Setiap unit pasar dikelola oleh seorang kepala Pasar

tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh tim yang terdiri, retribusi, petugas keamanan, petugas kolektor, dan jajaran staf administrasi guna memastikan pasar beroperasi dengan tertib dan lancar.

Di Pasar Panorama terdapat 14 orang staf yang terdiri atas, staf retribusi, petugas K2P, petugas keamanan, serta petugas Kasubag tata usaha. Seluruh staf tersebut memiliki peran penting dalam mendukung tugas Kepala Pasar untuk memastikan pengelolaan pasar berjalan efektif dan efisien, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang. Kepala Pasar juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan serta mengatur lahan atau lapak bagi pedagang agar kegiatan jual beli dapat berlangsung secara tertib dan teratur. Setiap lapak di Pasar Panorama telah dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis dagangan dan peruntukannya.

Diketahui bahwa dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah berupaya memaksimalkan pengguna sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan pasar. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan baru, tetapi lebih mengutamakan pemanfaatan fasilitas yang ada seperti lapak permanen dan kios pasar.

Bagi para pedagang kaki lima, fasilitas yang diberikan oleh kepala cabang sebenarnya sudah memadai. Namun, pedagang yang berjualan di luar Pasar tersebut tidak mendapatkan izin resmi dari pihak pengelola pasar karena legal, sementara para pedagang kaki lima yang berjualan di dalam pasar dengan ketentuan pembayaran tarif tertentu, baik secara mingguan maupun bulanan. Selama berjualan, para pedagang tidak pernah menerima teguran atau larangan karena mereka telah memperoleh izin dari pihak terkait.

Disposisi

Dalam proses implementasi kebijakan, sikap implementor ketersediannya mengawal keamanan pasar. Dalam pasar terdapat jabatan Kepala Pasar dan Kepala Urusan yang bertanggung jawab dalam mengatur aspek keamanan serta menangani berbagai urusan umum di lingkungan pasar. Dalam pelaksanaan tugasnya, berperan dalam menciptakan keamanan serta mengelola berbagai urusan.

Diketahui bahwa dukungan petugas lapangan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bengkulu. Kepala Staf UPTD Pasar Kota Bengkulu menyampaikan bahwa petugas lapangan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan. Mereka tidak hanya menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga berperan aktif memberikan arahan dan pendampingan kepada para pedagang.

dapat diketahui bahwa pemerintah melalui UPTD pasar telah menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap aspirasi para pedagang. Pedagang menyampaikan bahwa setiap keluhan atau saran yang diberikan kepada petugas lapangan biasanya mendapat tanggapan yang baik. Hal ini terlihat dari adanya tindak lanjut konkret yang dilakukan oleh pihak UPTD, seperti melakukan pengecekan lapangan dan menyesuaikan kembali penataan lapak apabila terdapat kendala.

Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman agar setiap pelaksana kebijakan memiliki acuan yang sama dalam menjalankan tugasnya. Struktur birokrasi memiliki kaitan erat dengan bagaimana kesesuaian organisasi birokrasi berperan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Sementara itu, para pedagang kaki lima juga mengakui bahwa pemerintah memang melakukan koordinasi lintas instansi. Hal ini terlihat setiap kali dilakukan kegiatan penertiban atau relokasi tempat berjualan, di mana biasanya terdapat petugas dari berbagai instansi yang terlibat secara bersamaan. Menurut pedagang, hal tersebut membuat proses penataan menjadi lebih tertib dan jelas bagi mereka. Dari sisi masyarakat, khususnya pengunjung pasar, mereka menilai bahwa hasil koordinasi antarinstansi telah memberikan dampak positif terhadap kondisi pasar. Masyarakat mengungkapkan bahwa penataan pasar kini terlihat lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Jika dulu masih sering terjadi tumpang tindih tugas antarpetugas, kini terlihat adanya kerja sama yang lebih baik dan terkoordinasi antara pihak pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu turut melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana pasar, serta memberikan arahan agar tidak berjualan di lokasi yang dilarang, melainkan di tempat yang telah disiapkan oleh pihak pasar. Struktur birokrasi yang dimiliki, dengan para pelaksana kebijakan di dalamnya, telah memenuhi ketentuan yang

dibutuhkan, di mana setiap hari mereka rutin memberikan laporan kepada UPTD Kota Bengkulu sebagai bentuk kesesuaian organisasi birokrasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik.

Pembahasan

Dalam hasil penelitian ini, terdapat empat variabel menurut teori Edward III. Keempat variabel Penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis ini menggunakan teori George C. Edwards III yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Interpretasi hasil penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang sesuai dengan konteks penelitian ini.

1. Komunikasi

Berdasarkan teori George C. Edwards III, komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan mencakup tiga aspek utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut belum terlaksana secara optimal di Pasar Panorama, di mana komunikasi yang tidak konsisten menyebabkan pedagang kurang memahami kebijakan dan menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menegaskan bahwa kejelasan dan konsistensi informasi antar pelaksana serta pihak sasaran kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Ketika pesan kebijakan tidak disampaikan secara jelas dan seragam, maka pelaksana maupun masyarakat penerima kebijakan akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap tujuan kebijakan tersebut. Hal serupa juga ditegaskan oleh Grindle (1980), bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Selain itu, menurut Lasswell (1948), keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kesesuaian antara siapa yang menyampaikan pesan, isi pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, dan efek yang ditimbulkan. Dengan demikian, ketidakkonsistenan pesan dalam komunikasi kebijakan dapat menghambat pemahaman dan penerapan kebijakan secara menyeluruh di lapangan.

Komunikasi yang tidak efektif dalam proses implementasi kebijakan berdampak langsung terhadap pelaksanaan di lapangan. Ketidakkonsistenan informasi antara pemerintah, petugas lapangan, dan pedagang kaki lima menyebabkan terjadinya kesalahpahaman mengenai aturan dan mekanisme pengelolaan pasar. Pedagang yang tidak menerima informasi dengan jelas cenderung bersikap pasif, menolak kebijakan, atau bahkan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan karena merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses sosialisasi. Kondisi ini juga menimbulkan kesulitan bagi petugas lapangan dalam menjalankan tugas pengawasan, karena adanya perbedaan persepsi antara pelaksana dan penerima kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa komunikasi yang terputus atau tidak konsisten dapat menurunkan efektivitas implementasi, sebab setiap pelaksana memiliki interpretasi yang berbeda terhadap tujuan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem komunikasi yang lebih terarah, terbuka, dan berkelanjutan antara pemerintah dan pedagang kaki lima agar kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

1. Sumber Daya

Menurut teori George C. Edwards III, salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirumuskan tidak dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Panorama Kota Bengkulu, ditemukan bahwa aspek sumber daya belum berfungsi secara optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan jumlah petugas lapangan yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, sehingga pelaksanaan kebijakan sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal fasilitas pendukung, seperti sarana kebersihan, tempat penampungan sementara, dan peralatan administrasi yang belum memadai untuk menunjang aktivitas pengelolaan pasar.

Keterbatasan sumber daya manusia juga berdampak pada efektivitas komunikasi dan koordinasi antarpetugas, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan, keahlian, dan pemahaman yang cukup terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks ini, sebagian petugas lapangan belum memperoleh pelatihan yang memadai mengenai mekanisme pengelolaan pasar dan pendekatan yang efektif kepada pedagang. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung oleh kapasitas pelaksana yang kompeten dan didukung sarana operasional yang mencukupi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun fasilitas, menjadi salah satu faktor

penghambat utama dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

3. Disposisi

Menurut teori George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi dan sumber daya, tetapi juga pada disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Disposisi mencerminkan tingkat komitmen, kejujuran, tanggung jawab, serta kemauan dari para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap positif dari pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kegiatan implementasi berjalan efektif dan sesuai arah kebijakan. Sebaliknya, apabila pelaksana memiliki sikap yang kurang mendukung atau tidak sejalan dengan tujuan kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami hambatan, meskipun sumber daya dan struktur birokrasi telah tersedia dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Panorama Kota Bengkulu, ditemukan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan masih bervariasi. Sebagian petugas lapangan menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya penataan pedagang kaki lima, namun di sisi lain, masih terdapat pelaksana yang bersikap pasif dan kurang proaktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi, keterbatasan pelatihan, serta minimnya insentif bagi petugas yang bekerja di lapangan. Akibatnya, beberapa kebijakan seperti penertiban area jualan, pembinaan pedagang, dan pengawasan aktivitas pasar belum berjalan secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa sikap dan kecenderungan para pelaksana (implementor disposition) sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Ketika pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan mendukung terhadap isi kebijakan, maka mereka akan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila pelaksana bersikap netral atau menolak kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. Selain itu, Grindle (1980) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh orientasi dan motivasi pelaksana, terutama sejauh mana mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kebijakan tersebut.

Dalam konteks pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Panorama, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan mengindikasikan perlunya penguatan aspek pembinaan dan motivasi bagi petugas lapangan. Pemerintah perlu menanamkan nilai tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap kebijakan, misalnya melalui pelatihan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberian penghargaan bagi pelaksana berprestasi. Dengan demikian, diharapkan pelaksana kebijakan dapat memiliki disposisi yang positif, proaktif, dan berkomitmen dalam menjalankan kebijakan pengelolaan pasar secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut teori George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi berperan penting dalam mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar pelaksana kebijakan agar setiap kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Edwards III menekankan bahwa kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan apabila terdapat struktur organisasi yang jelas, prosedur operasional standar (SOP) yang tegas, serta mekanisme koordinasi yang baik antar unit pelaksana. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kompleks, tumpang tindih, atau tidak memiliki jalur koordinasi yang efektif dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Panorama Kota Bengkulu, ditemukan bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah terdapat pembagian tugas antara pihak pengelola pasar, petugas lapangan, dan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta UPTD Pasar, namun koordinasi di antara mereka belum terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan aturan penataan pedagang serta kurangnya keseragaman dalam pelaporan dan tindak lanjut pelanggaran di lapangan. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi membuat pelaksana kebijakan sering kali bekerja berdasarkan arahan situasional, bukan pada pedoman tertulis yang baku.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada masih bersifat administratif dan belum adaptif terhadap dinamika di lapangan. Padahal, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana struktur organisasi mampu menciptakan komunikasi vertikal dan horizontal yang baik di antara pelaksana kebijakan. Koordinasi yang lemah dan alur tanggung jawab yang tidak jelas akan menyebabkan kebijakan sulit diimplementasikan secara konsisten. Sejalan dengan hal tersebut, Grindle (1980) juga menegaskan bahwa struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis sering kali memperlambat respons kebijakan terhadap perubahan situasi di masyarakat, terutama dalam konteks penataan sektor informal seperti pedagang kaki lima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan mengelola pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Panorama, kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan fokus penelitian, berdasarkan proses implementasi dan hasil kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi antara implementor dan pedagang belum terlaksana secara optimal, karena masi terdapat pedagang yang belum menerima informasi terkait kegiatan sosialisasi, sementara sebagian lainnya sudah memperoleh informasi tersebut.
- b. Sumber daya yang bertugas dalam pengelolaan pedagang kaki lima terbatas tetapi sudah cukup baik dan memuaskan dan sudah tergolong memadai, sedangkan sumber daya fasilitas untuk pedagang kaki lima masi terbatas.
- c. Disposisi atau sikap implementor dalam menjalankan tugasnya sudah tergolong baik dan profesional yang terlihat dari perilaku sopan dalam memberikan informasi pelaksana kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan dikatakan sudah baik, dilihat dari mekanisme pelaksanaan kebijakan mengikuti SOP yang ada, struktur birokrasi implementasi kebijakan sudah baik dan sesuai standar yang berlaku.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pemerintah Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

- a. Faktor Pendukung implementasi Kebijakan
 1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Pelaksana Kebijakan
Komitmen yang kuat dari Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Panorama menjadi faktor utama pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintah secara rutin melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada para pedagang agar tidak berjualan di area terlarang. Petugas lapangan juga menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan aturan serta memberikan pendampingan bagi pedagang yang direlokasi.
 2. Adanya Dasar Hukum yang Jelas
Kebijakan pengelolaan PKL berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Kejelasan dasar hukum ini memberikan legitimasi dan arah yang tegas bagi pelaksana kebijakan dalam melakukan penataan, penertiban, dan pembinaan kepada para pedagang.
 3. Koordinasi Antarinstansi yang Mulai Terbangun
Pelaksanaan kebijakan penataan PKL melibatkan kerja sama antara UPTD Pasar, Dinas Perdagangan. Koordinasi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan di lapangan karena setiap instansi memiliki peran yang saling mendukung dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
 4. Kesadaran Sebagian Pedagang untuk Tertib
Sebagian pedagang telah menyadari pentingnya berjualan di tempat resmi dan tertata. Mereka mulai menempati lapak yang disediakan pemerintah karena dinilai lebih aman dan nyaman. Kesadaran ini merupakan hasil dari proses komunikasi dan pembinaan yang terus dilakukan oleh pemerintah.
- b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
 1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pedagang
 2. Sebagian PKL masih berjualan di area yang dilarang karena dianggap lebih ramai pembeli. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya ketertiban dan aturan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menegakkan kebijakan.
 3. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran
 4. Jumlah petugas lapangan yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional menghambat kegiatan pembinaan dan penataan yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.
 5. Fasilitas Menunjang yang Belum Memadai
 6. Kondisi lapak dan sarana penunjang seperti tempat pembuangan sampah, penerangan malam, serta area relokasi yang kurang representatif membuat pedagang enggan berpindah ke tempat resmi. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan penataan.

Komunikasi yang Belum Konsisten

Dalam proses sosialisasi, informasi yang disampaikan sering kali tidak seragam antarpetugas, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang. Bahasa dan istilah formal dalam kebijakan juga sulit dipahami oleh sebagian pedagang, menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, agar penulisan ini dapat memberikan manfaat, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu.

1. Pemerintah Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan komunikasi terkait dalam pelaksanaan kebijakan mengelola pedagang kaki lima (PKL). Selain itu, perlu sosialisasi yang lebih intensif dan merata agar seluruh pedagang memahami kebijakan yang berlaku. Pemerintah juga disarankan menambah fasilitas pendukung seperti tempat berjualan yang layak sehingga tidak berjualan di bahu jalan.
2. Bagi pedagang kaki lima (PKL) diharapkan dapat mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta turut menjaga ketertiban dan kebersihan di lokasi usaha. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pedagang kaki lima dan pemerintah, diharapkan kegiatan ekonomi informal ini dapat tumbuh tanpa mengganggu ketertiban umum.
3. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima perlu dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, sehingga perbaikan dapat diterapkan dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Hidayat, M. (2019). *Analisis faktor penghambat dan pendukung penataan PKL di Pasar Tradisional Kota Bandung* (Tesis). Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar.
- Rahman, A. (2021). Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 45–57.
- Rahmawati, D. (2020). *Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Surabaya* (Skripsi). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sari, N. P., & Nugroho, R. (2020). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–124.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Anggresu, G. (2019). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Kota Manado)*. *Jurnal Administrasi Publik*. ejournal.unsrat.ac.id
- Sujatna, Y. (2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM)*. (PDF tersedia). E-Journal Unikama
- Purbo, P. (tahun). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar, Semarang*. (laporan/skripsi; tersedia di Neliti). Neliti
- Rohman, M. R. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima*. *IRPIA Journal / jurnal lokal (studi dan literatur terkait)*. ejournal.irpia.or.id
- Virsaliana, R. M. (2014). *Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. *Journal of Politics and Government Studies (Undip)*. E-Journal Undip
- Purwanto, J. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca COVID-19*. *Jurnal (Universitas Widya PGRI Ponorogo / UWP)*. jurnal.uwp.ac.id
- Firmansyah, A. (2017). *Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menata Pedagang Kaki Lima (kajian sejarah/publikasi lokal)*. (terindeks di ejournal/UMMAT). Jurnal UMMAT

Dokumen skripsi: *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pasar Mandai, Makassar)*. (digilib Unismuh — tersedia full text PDF). [Perpustakaan Digital Unismuh](#)

Renald, F. (2025). *Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima (evaluasi Pergub)*. Binamulia / ejournal hukum (PDF tersedia). ejournal.hukumunkris.id

Hanandini, D. (2025). *Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Pariaman*. Jurnal SIMBOL / e-journal kampus (PDF tersedia). [mail.ejournal.stisipimambonjol.ac.id](mailto:ejournal.stisipimambonjol.ac.id)